

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kaderisasi Pastoral Keuskupan Surabaya

a. Pastoral

Pastoral adalah bentuk pelayanan yang tidak hanya berfokus pada relasi antar sesama manusia, tetapi juga pada hubungan manusia dengan Allah, sekaligus menempatkan Allah dalam setiap hubungan antar manusia. Pastoral bertitik tolak pada perutusan Gereja yang merupakan karya Kristus sendiri. Kegiatan pastoral mencakup mengajar atauewartakan, mengkuduskan, memimpin, menata, dan membimbing. Tujuan utama pastoral adalah untuk membebaskan, memberdayakan, dan memelihara seluruh aspek kehidupan manusia (Pedoman Dasar Dpp Bgkp Keuskupan Surabaya, 2012). Menurut (States Conference of Catholic Bishops, 1997) mengatakan bahwa Pastoral terbagi menjadi beberapa jenis pelayanan yaitu pastoral liturgis, pastoral kateketik, pastoral keluarga, pastoral sosial, pastoral pendidikan, pastoral kaum muda, pastoral khusus. Dalam penelitian ini akan berkaitan dengan pastoral sosial yang didasarkan pada ajaran sosial Gereja, seperti yang terdapat dalam dokumen *Rerum Novarum*, *Gaudium et Spes*, *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, serta ensiklik-ensiklik lainnya yang menekankan keadilan sosial.

b. Keuskupan

Keuskupan memiliki pengertian suatu istilah untuk umat Katolik yang tinggal di sebuah wilayah atau yuridiksi gerejawi-gerejawi tertentu yang ditetapkan bagi beberapa denominasi Kristiani, yang diatur oleh seorang uskup. Uskup merupakan pengganti rasul Kristus, Kristus mempersatukan para rasul untuk menjadi guru pada waktu mengajar, menumbuhkan iman dalam beribadatan suci serta hamba dalam kepemimpinan. Uskup masuk urutan ketiga dari struktur hirarki kepemimpinan Gereja Katolik (John Paul II States Conference of Catholic Bishops, 1997). “Keuskupan adalah persekutuan umat Katolik dalam suatu wilayah geografis tertentu yang pengembalaannya dipercayakan kepada Uskup dan dibantu oleh pastor yang mendapatkan perutusan dan wewenang” (Pedoman Dasar DPP BGKP Keuskupan Surabaya, 2012).

c. Kaderisasi

Menurut Kurniaty (2016) dalam jurnal penelitian (Rahmadani et al., 2024) kaderisasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Prancis, yaitu *cadre* yang berarti elite, artinya seseorang yang terpilih, terbaik karena terlatih, dan merupakan seseorang yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dalam buku Politik Katolik dan Kaderisasi Bangsa (Alaman, 2019) Kaderisasi adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, karakter, dan keterampilan seseorang agar mampu menjadi kader atau pemimpin yang memiliki

tanggung jawab sosial dan siap terjun ke masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Gerejawi. Pengertian kaderisasi ialah suatu cara atau proses dalam mendidik dan membentuk seseorang menjadi kader.

Menurut (Cholis, 2021) dalam jurnal Manajemen Kaderisasi dalam Mencetak Kader Organisasi Militan mengatakan kaderisasi merupakan hal yang sangat esensial bagi suatu organisasi, dikarenakan kaderisasi merupakan inti dari keberlanjutan perjuangan organisasi masyarakat baik organisasi kecil maupun organisasi yang sangat besar bahkan sudah mendunia ke dalam masa depan yang lebih cerah. Kaderisasi menurut (Contreras, 2023) bahwa proses pembentukan karakter dan pengembangan ketrampilan tidak hanya pada teori melainkan praktik langsung dapat membekali para kader agar siap menghadapi tantangan dan masalah yang muncul dalam organisasi.

Sulit jika dibayangkan jika sebuah organisasi berjalan dan melaksanakan program kerja tanpa adanya kaderisasi terlebih dahulu. Sedangkan kader atau orang yang telah berkecimpung dalam organisasi seharusnya orang yang sudah menempuh dan mempunyai bekal berbagai potensi, ketrampilan dan integritas. Maka dari itu perlunya kaderisasi untuk mengembangkan partisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

2. Konsep Partisipasi dalam Organisasi Kamahasiswaan

a. Partisipasi

Menurut (Bazan & Sypniewska, 2020) dalam jurnal *The Impact of Management Methods on Employee Engagement*, partisipasi adalah proses pada keterlibatan emosional dan mental seorang individu dalam suatu kegiatan kelompok yang ingin mencapai tujuan bersama. Bazan & Sypniewska (2020) mengidentifikasi beberapa jenis partisipasi dalam konteks organisasi;

1) Partisipasi Aktif

Individu berkontribusi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, memberikan ide, atau menjalankan program organisasi. Bazan & Sypniewska menekankan bahwa partisipasi aktif meningkatkan rasa tanggung jawab anggota

2) Partisipasi Pasif

Anggota hanya mengikuti kebijakan atau instruksi tanpa memberikan masukan atau memengaruhi proses keputusan.

Dalam konteks dinamika organisasi, partisipasi anggota tidak hanya terjadi melalui organisasi yang resmi, tetapi juga dapat muncul dari interaksi sosial yang tidak terstruktur secara formal. Perbedaan antara partisipasi formal dan informal menjadi penting untuk dipahami karena masing-masing memiliki peran strategis

dalam membentuk budaya organisasi serta memengaruhi efektivitas kolaborasi dan kreativitas anggota (J Chua et al., 2024)

1) Partisipasi Formal

Melibatkan keterlibatan individu dalam struktur formal organisasi, seperti keikutsertaan dalam rapat, penyusunan kebijakan, atau kelompok kerja. Contoh: Menjadi anggota dewan atau panitia dalam organisasi.

2) Partisipasi Informal

Keterlibatan yang terjadi di luar struktur formal, seperti diskusi informal, saran pribadi, atau komunikasi tidak langsung. Contoh: Diskusi ide antaranggota organisasi dalam lingkungan nonformal.

b. Organisasi Kemahasiswaan

Dikutip dari (Hanung Rahma Aulia et al., 2024) Rivaldi (2013) menyatakan bahwasanya organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk menggali kemampuan dalam berorganisasi, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan melatih ketrampilan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran yang penting dalam membentuk generasi muda terutama dalam hal tanggung jawab, kemandirian dan kedisiplinan (Zou et al., 2024).

Organisasi kemahasiswaan juga berfungsi sebagai tempat mahasiswa dalam mengembangkan civic skills, yang meliputi

keampilan intelektual (*intellectual skills*) dan ketrampilan partisipasi (*participation skills*). Hal ini didukung oleh pendapat (Halim Nugraha et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa melalui organisasi, mahasiswa mempunyai kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat serta berkontribusi dalam kehidupan di lingkungan sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Kosasih (2024) yang menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan menunjang civic skills sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis, adaptif baik dalam lingkup kecil maupun lebih luas, melakukan interaksi dengan orang lain, cepat tanggap dan bisa memunculkan pikiran positif dalam mengatasi beberapa permasalahan.

c. Konsep Domain Sosiokultural Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tiga domain utama, yaitu: 1) domain akademik, 2) domain kurikuler, dan 3) domain sosial-kultural (Hasanah, 2024). Domain akademik meliputi berbagai kajian dan pemikiran terkait Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang dalam komunitas ilmiah. Domain kurikuler mencakup konsep dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal (Hameed et al., 2023). “Sementara itu, domain sosial-kultural mengacu pada penerapan konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat” (Maizul Habibah, 2021). Ketiga domain tersebut saling berkesinambungan,

berakar pada esensi pendidikan dan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizens*).

Domain Sosiokultural menurut (Ramadhan & Aditya Dewantara, 2025) dengan memandang warga sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial, bukan sekadar objek kebijakan negara, hal ini dapat membangun masa depan kewarganegaraan Indonesia yang bermartabat, berlandaskan sosial budaya, dan inklusif. Sapriya (2015) dalam (Aulia et al., 2020) menambahkan bahwa salah satu domain Pendidikan kewarganegaraan adalah “sosial kultural yang merupakan program PKn yang dapat mengikuti perkembangan zaman untuk warga negara yang berada di lingkungan masyarakat di luar akademik. Hal ini juga dibahas pada jurnal (Ashri et al., 2021) yang ditulis oleh Jang & Jiemenez (2012) yang mengatakan sosiokultural ini teori yang mempunyai keterkaitan erat dengan hubungan sosial dan sebagaimana teori tersebut menghasilkan dampak di lingkungannya.

Dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizens*) di lingkungan masyarakat penelitian menurut Maizul Habibah (2021) mengatakan bahwasannya terdapat komponen inti yang bisa menjadi penentu faktor perilaku dalam diri warga negara, yaitu literasi kewarganegaraan yang di dalamnya mencakup *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) and *civic dispositions* (nilai dan sikap kewarganegaraan). “Dari ketiga cakupan tersebut akan membentuk

pondasi *civic engagement* (partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara)” (Schulz et al., 2023).

Gabungan dari pengetahuan, sikap, dan tingkah laku maupun ketrampilan yang memiliki moral akan menghasilkan *good citizens*.

“Pancasila Education and Citizenship have the vision and mission of developing the students into human beings who have a sense of nationality and love of homeland, through the process of receiving and carrying out the religious teachings he said; And have honest, disciplined, responsible, polite, caring, and confident behaviors in interacting with family, friends, and teachers; Understand and apply factual and conceptual knowledge about citizenship; and presents factual and conceptual knowledge of citizenship skillfully.”

Hal ini dikemukakan oleh (Jayadiputra & Karim, 2020) yang memaparkan visi misi Pendidikan Pancasila dan visi misi tersebut mengandung *civic skills*. Pernyataan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Murdiono, 2020) yang menjelaskan bahwa visi dan misi ini mampu menjadikan warga negara yang terampil (*civic skills*) dan didalamnya terdapat intelektual (*intellectual skills*) dan ketrampilan partisipasi (*participation skills*).

Civic Knowledge menurut (Noe et al., 2021) adalah Pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan untuk mendidik peserta agar bisa berpikir kritis, analitis dalam mempersiapkan kehidupan yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang dimana Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya disiplin ilmu yang harus berada dalam akademik saja namun juga melihat dari kacamata Pendidikan kewarganegaraan yang berada pada domain sosio kultural yang bahwasannya domain ini berguna untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter yang baik terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan dengan pernyataan (Schulz, 2024) dalam buku *Young People's Trust In Institutions, Civic Knowledge and Their Dispositions Toward Civic Engagement* yang mengatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan yang meningkatkan *civic knowledge* merupakan kunci yang penting dalam memperkuat karakter.

Adapun pengertian menurut (Septiana, 2020) *Civic Disposition* yang merujuk pada tingkah laku ataupun sikap yang positif itu dibutuhkan sekali oleh warga negara hal ini berguna untuk menjaga dan menempatkan posisi yang baik sebagai individu yang tidak bisa lepas dari ketergantungan individu-individu lain. Pernyataan ini sejalan dengan Owen yang mengutip dari buku *High School Students' Acquisition of Civic Dispositions: The Impact of We the People* yang menyatakan, *dispositions cover a range of interpersonal and intrapersonal values, virtues, and behaviors that provide a foundation for individuals' active embrace of the norms of good citizenship.* (Owen, 2020) Disposisi ini mencakup berbagai nilai, kebajikan, dan perilaku

interpersonal dan intrapersonal yang memberikan dasar bagi individu untuk secara aktif mengadopsi norma kewarganegaraan yang baik.

Dari ketiga *Civic* tersebut, yaitu: *Civic Skills*, *Civic Knowledge*, *Civic Dispositions* akan menghasilkan *Civic Engagement*. Dalam penulisan tradisional di bahas dalam buku *Civic Engagement in Changing Contexts Challenges and Possibilities for Democracy* (Kennedy, 2021) *civic engagement* telah mengalami pengembangan dari fokus yang eksklusif dalam keterlibatan politik menjadi keterlibatan sosial yang didalamnya terdapat partisipasi dalam kelompok sosial maupun sukarelawan dalam suatu organisasi. Menurut (Hidayah et al., 2025) “*Civic engagement* berbasis nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam membangun kesadaran konstitusional yang dapat mewujudkan warga negara yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dalam jurnal yang berjudul *Memperkuat Civic Engagement Pada Generasi Muda* (Roulina Sihombing & Alhudawi, 2023) *Civic engagement* biasanya disebut dengan *civic participation*, yang merupakan segala sesuatu berhubungan dengan tindakan warga negara baik individu maupun kelompok untuk ikut berpartisipasi terhadap kegiatan dalam lingkungan Masyarakat.

3. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan suatu syarat dalam mendukung proses tercapainya pembentukan teori yang penulis rangkai guna mengetahui suatu dan menghindari fokus penelitian dari penelitian-

penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan kajian penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Hieronymus Yuwan Pratama, Menemukan Bentuk Dan Proses Kaderisasi Pemimpin Dalam Kegiatan Rohani Kampus. Skripsi ini membahas tentang strategi dalam menciptakan kader-kader kepemimpinan yang tangguh untuk suatu organisasi kampus.
2. Randy Halim Nugraha, Sintia, Zahwa Cahyadi, Peran Organisasi Internal Kampus Dalam Meningkatkan *Civics Skills* Mahasiswa. Jurnal ini membahas tentang efektivitas organisasi kemahasiswaan internal kampus dalam membentuk dan meningkatkan karakteristik kewarganegaraan pada mahasiswa.
3. Kristianus, dkk, Pembinaan Kepemimpinan Orang Muda Katolik: Di Paroki Kuala Dua Dan Beduai Keuskupan Sanggau. Jurnal ini menganalisis mengenai Gereja Keuskupan Jayapura dapat secara aktif dan transformatif di Papua yang berlandaskan teologi Kristiani.
4. Louis, Kaderisasi Mahasiswa Keuskupan Surabaya Dalam Terang Seruan *Apostolik Christus Vivit* (Vol.4). Jurnal ini membedah latar belakang kaderisasi berdiri dan pelaksanaan program kaderisasi Keuskupan Surabaya dari sudut pandang gereja Katolik.

Dari serangkaian judul skripsi dan jurnal menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam variabel yang peneliti tulis. Persamaannya dengan penulis adalah menggunakan variabel kaderisasi atau pengembangan orang muda atau mahasiswa dalam konteks

organisasi. Perbedaannya terdapat pada variabel kedua yaitu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yang dimana peneliti menguraikan penjelasan yang menyeluruh mengenai aspek seorang individu, kelompok maupun organisasi, sehingga data yang diperoleh akan subjektif. Judul tersebut akan dikaitkan dengan domain sosio kultural Pendidikan kewargaegaraan yang mencakup *civic skill*, *civic knowledge*, *civic disposition* yang akan menghasilkan *civic engagement*.

4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu proses seseorang penulis untuk berfikir sehingga bisa menuangkan suatu gagasan pada karya tulis ilmiahnya yang mendasari penelitian yang hendak akan dilakukan untuk memperoleh suatu jalan keluar terhadap masalah yang terstruktur dan runtut sesuai dengan pedoman penelitian. Penulis membuat kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dari gambar bagan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa fokus utama pada kerangka berpikir yang penulis teliti terletak pada dua variabel yang meliputi:

1. Program kaderisasi yang digunakan oleh Pastoral Keuskupan Surabaya.
2. Pengaruh partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan setelah mengikuti program kaderisasi.